

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN MBAY 1 KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO**

Soleman Bully

Staf pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Undana

e-mail: solemanbully@staf.undana.ac.id

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan hambatan apa yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di kelurahan Mbay 1, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo serta untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami kejadian yang digambarkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Dengan bentuk penelitian ini, memungkinkan peneliti dapat mendeskripsikan suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan yaitu data primer maupun data sekunder yang peneliti peroleh dari lapangan diolah menjadi suatu kalimat yang jelas sehingga dapat dipahami. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala lurah, ketua LPMK, dan masyarakat dalam hal ini adalah kepala lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di kelurahan Mbay 1 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal. Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat dilihat kurang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mana pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak menentukan jadwal rapat yang tepat untuk melaksanakan pertemuan bersama ketua RT dan kepala lingkungan dalam hal ini yaitu melakukan penggalan gagasan (pagas) untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu, keluhan serta usulan dari masyarakat disampaikan ke pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta pengurus kelurahan ketika ada musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kelurahan dapat dikatakan sangat lama karena hal tersebut hanya diadakan dalam satu kali dalam satu tahun. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1 yaitu pada saat ada program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan akan diserahkan ke pihak ketiga yaitu tim pengawas dalam hal ini yang melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut menyebabkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak proaktif terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1.

Kata kunci : Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Secara umum, arah tujuan pembangunan suatu negara dilakukan adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan utama dari Negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang pada dasarnya tujuan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk bangsa Indonesia mencakup seluruh masyarakat di negeri ini. Pembangunan harus dijalankan secara seimbang atau menyeluruh.

Pembangunan tidak hanya dititikberatkan dalam satu aspek saja. Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Pembangunan yang hanya memperhatikan dalam satu aspek saja, akan berakibat bahwa proses pembangunan itu akan mengalami ketimpangan, serta tidak pernah akan berhasil untuk membawa masyarakat kepada kesejahteraan (Bertholomeus, 2003:107).

Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan dilakukan secara merata sampai ke seluruh daerah-daerah sehingga pembangunan nasional akan terwujud secara menyeluruh. Masyarakat yang ada di setiap daerah juga mempunyai kendali dalam hal tersebut, sehingga peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan di pedesaan dan kelurahan, karena masyarakat setempatlah yang mengetahui keunggulan dan kekuatan serta kekayaan yang dimiliki oleh daerahnya, selain itu juga masyarakat adalah orang-orang yang menggerakkan pembangunan di daerahnya, jadi pembangunan yang berhasil akan membawa masyarakat kepada kesejahteraan.

Patut disadari bahwa pembangunan sudah diwarnai semangat reformasi yang mengedepankan demokratisasi pembangunan. Untuk itu perlu kesamaan visi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat, swasta dan pemerintah menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan yang demikian muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat (Gunawan, 2007: 100-101).

Pada hakikatnya, pembangunan nasional bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah melainkan masyarakat juga terlibat dalam pembangunan tersebut sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan yang seperti itu timbul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Jika keberhasilan pembangunan masyarakat di desa atau kelurahan tercapai, maka semua rancangan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian atau hasil pembangunan mesti menjadikan masyarakat ikut terlibat sebab masyarakatlah yang tahu akan persoalan dan hal apa yang dibutuhkan untuk membangun daerahnya karena masyarakat setempatlah yang hendak memanfaatkan dan memberi nilai mengenai berhasil atau tidak pembangunan di daerahnya.

Pemberdayaan masyarakat mengandung arti meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi : 1) menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan masyarakat berkembang. 2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan daerah. 3) melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan (Gunawan, 2007:107).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha menciptakan serta meningkatkan kemampuan masyarakat yang dapat berdiri sendiri yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang membina masyarakat melalui bermacam-macam cara yaitu dengan memberikan bantuan dana, membuat pelatihan, membangun sarana dan prasarana secara fisik maupun sosial. Pengembangan lembaga-lembaga daerah yang dapat menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya maupun masyarakat setempat.

Pemberdayaan sebenarnya tidak hanya mencakup orang perorangan dalam suatu masyarakat tapi termasuk juga aspek yang mengatur tingkah lakunya serta semua perlengkapannya yang bermanfaat memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam masyarakat. Misalnya dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan yang beradab seperti nilai tanggung jawab, jujur, kerja keras,

bertoleransi, merupakan bagian penting mengenai usaha pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu tindakan sosial yang mana masyarakat di suatu daerah sebagai satu kesatuan merencanakan tindakan secara bersama untuk mengatasi masalah sosial atau menunaikan kebutuhan sosial sesuai dengan kesanggupan dan sumberdaya yang mereka miliki.

Lembaga Ketahanan Masyarakat desa/kelurahan (LKMD /LKMK) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan (LPMD/LPMK) adalah suatu badan atau organisasi yang membantu pemerintah desa atau kelurahan untuk menampung serta melaksanakan harapan dan tujuan atau aspirasi maupun kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Program pembangunan kelurahan merupakan suatu usaha yang dirancang dengan memiliki tujuan untuk memajukan serta meningkatkan pembangunan pada suatu usaha yang sudah ditentukan untuk mencapai beberapa proyek pembangunan di kelurahan. Program pembangunan kelurahan dapat dipahami juga sebagai suatu rancangan terkait usaha yang telah diatur serta mempunyai tujuan yang nyata dimana program tersebut dilakukan dengan upaya-upaya secara terencana sesuai dengan tempat dan waktu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 8 Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu melalui Musyawarah Pembangunan (Musrembang) yang dilakukan bersama setiap warga masyarakat serta perangkat-perangkat LPMK selaku pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Seluruh aspirasi masyarakat yang ada akan dibahas pada saat musyawarah yang dilaksanakan oleh kelurahan. Dalam musyawarah tersebut membahas mengenai pembangunan seperti apa yang akan diutamakan dalam pembangunan, sehingga nanti pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk kepentingan bersama serta tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan pihak tertentu.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan melaksanakan aspirasi dan prakarsa dari masyarakat serta menjadi koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan pihak yang mengendalikan pembangunan.

Berdasarkan pengamatan penulis, diketahui bahwa di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai lembaga yang membantu lurah belum terlalu memperlihatkan suatu hal yang bertuju pada arah pembangunan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada salah satu lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kurang maksimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Mbay 1 serta belum melaksanakan peran sesuai dengan peran dan pekerjaan atau fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan dalam pembangunan dalam hal ini yaitu pembangunan fisik, dilihat dari tidak proaktifnya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Gunawan (2007:4) metode deskriptif adalah metode untuk menggambarkan situasi atau kejadian. Dengan demikian kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungannya, membuat prediksi, serta menyimpulkan makna atas persoalan yang dibahas.

Berdasarkan pandangan di atas dapat dikatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami kejadian yang digambarkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Dengan bentuk penelitian ini, memungkinkan penulis dapat mendeskripsikan suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau yang sebenarnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Lokasi ini dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan masih kurang maksimalnya tugas dan fungsi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan serta dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mbay 1 yang menjadi sasaran informasi penelitian yang berada di tempat tersebut yaitu Bapak Abdurahman Abubakar (57), serta pengurus kelurahan (kepala lurah) yaitu Bapak Richard W. Lamanepa (43), dan warga masyarakat Kelurahan Mbay 1 (kepala lingkungan) yaitu Bapak Syafrudin Usman (53), Bapak Husni Abdullah (55), Bapak Ahmad Sanusi (67), Bapak Muslim Rasyid (50) dan Bapak Abdul Salam Ibrahim (52) sebagai informan pendukung dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018 :368).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan (Burhan, 2013:129).

Data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dipilih oleh peneliti yaitu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kepala Lurah Mbay 1 dan beberapa kepala lingkungan yang didapat oleh penulis melalui teknik wawancara dan observasi data sesudah itu dikumpulkan langsung oleh penulis yang melakukan penelitian tentang “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo”.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer (Burhan, 2013:129).

Data sekunder dikumpulkan penulis melalui data-data pada buku-buku, web, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah kelurahan, kondisi umum kelurahan, keadaan sosial ekonomi penduduk, struktur organisasi kelurahan Mbay 1 dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra (Burhan, 2013:143).

Data informasi yang penulis peroleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan terkait masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memperhatikan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data penelitian tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2018:225). Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2018:228).

Penulis bertanya terkait beberapa hal yang menjadi inti masalah penelitian kepada narasumber. Pada penelitian ini dilakukan wawancara oleh penulis untuk mendapatkan data dari subjek penelitian peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di kelurahan Mbay 1, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Abdurahman Abubakar (57), Bapak Richard W. Lamanepa (43), Bapak Ahmad Sanusi (67), Bapak Muslim Rasyid (50), Bapak Syafrudin Usman (53), Bapak Abdul Salam Ibrahim (52) dan Bapak Husni Abdullah (55).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya (Burhan, 2013:154).

Pada teknik dokumentasi, penulis mencari serta mengumpulkan informasi serta data-data yang dapat dibuat atau disimpan dalam bentuk gambar, suara dan tulisan agar menambah informasi dalam hubungannya dengan dokumen tertulis atau catatan yang dapat menjelaskan keadaan di kelurahan Mbay 1 yang akan digambarkan oleh penulis. Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui cara memotret foto atau gambar ketika wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dipilih. Teknik dokumentasi ini dapat menunjukkan bukti bahwa penulis pernah melakukan penelitian mengenai "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Reduksi Data

Pada proses mereduksi data dilakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi (Ishak dan Ugi Suprayogi, 2012:108).

Dalam mereduksi data, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika penulis dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, itulah yang harus dijadikan perhatian penulis dalam melakukan reduksi data (Sugiyono, 2018 : 406).

2. Penyajian Data (Data Display)

Pada penyajian data maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2015:341). Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018:408) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif. Penyajian data yang disusun secara terurut sehingga strukturnya dapat dipahami akan mempermudah

penulis dalam menentukan kesimpulan mengenai penelitian “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo”

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berupa deskripsi (paparan yang rinci) atau gambaran tentang obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas (Sugiyono, 2015 : 345). Dengan hal ini membantu penulis memperoleh data yang dapat disimpulkan serta memperoleh jawaban mengenai tujuan dari penelitian ini terkait Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Ada beberapa penetapan untuk menguji keabsahan data, salah satunya yaitu uji kredibilitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Pada uji kredibilitas data hasil penelitian, penulis hanya menggunakan satu teknik yaitu triangulasi.

Triangulasi pada suatu pengujian kredibilitas ini memiliki arti sebagai pemeriksaan data dari beberapa sumber dengan bermacam cara, dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu William Wiersma dalam Sugiyono (2018:439). Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2018:440) mengatakan bahwa triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Resume Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Resume Hasil Penelitian	Sumber
1.	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara mengadakan rapat itu pun belum maksimal. Lembaga tersebut kurang berperan, yang mana pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak menentukan jadwal rapat yang tepat untuk melakukan rapat bersama setiap RT dan kepala lingkungan dalam hal ini yaitu melukan penggalan gagasan (pagas) untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada saat Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat kelurahan membutuhkan waktu sangat lama karena hanya diadakan satu kali dalam satu tahun.	Ketua LPMK, Kepala Lurah Mbay 1, Kepala Lingkungan Ameaba, Kepala Lingkungan Ladha, Kepala Lingkungan Kolikapa, Kepala Lingkungan Kajulaki, Kepala Lingkungan Boatiba
2.	Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Mbay 1,	Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1 yaitu pada saat ada program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan akan diserahkan ke	Ketua LPMK, Kepala Lurah Mbay 1, Kepala Lingkungan Ameaba, Kepala Lingkungan Ladha, Kepala Lingkungan

Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo	pihak ketiga yaitu tim pengawas yang melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mbay 1, namun pihak dari lembaga tersebut tidak mengkritisi terkait apa yang menjadi kewenangannya.	Kolikapa, Kepala Lingkungan Kajulaki, Kepala Lingkungan Boatiba
--	--	---

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 enam peran. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya mendeskripsikan dua peran terkait penelitian yang penulis lakukan karena keterbatasan waktu bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan melaksanakan aspirasi dan prakarsa dari masyarakat serta menjadi koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan pihak yang mengendalikan pembangunan. Oleh karena itu, peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam membantu tugas lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, keamanan dan ketertiban masyarakat, sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Alur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mbay 1 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan yaitu berawal dari adanya beberapa keluhan-keluhan yang ada dalam masyarakat kemudian keluhan tersebut disampaikan ke ketua RT setempat yang selanjutnya akan diteruskan pada saat ada pertemuan di kelurahan. Sebelum mengajukan ke kelurahan, masyarakat bersama ketua RT serta kepala lingkungan setempat, terlebih dahulu melaksanakan Pagas (penggalan gagasan) untuk menyampaikan usulan-usulan apa saja mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut. Masyarakat menyampaikan keluhannya kepada ketua RT serta kepala lingkungan masing-masing, setelah itu aspirasi serta keluhan masyarakat disampaikan ke pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam hal ini yang turut hadir pada saat Pagas (penggalan gagasan).

Namun, sebagai pihak yang mengkoordinir untuk melaksanakan rapat yaitu Pagas (penggalan gagasan) bersama masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak efektif dalam menentukan jadwal rapat yang membahas mengenai aspirasi serta keluhan masyarakat. Dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat baru disampaikan yaitu ketika ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ini difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan pihak kelurahan dalam hal ini yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh Ketua RT, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pengurus kelurahan dan juga masyarakat akan membahas serta mengambil keputusan secara musyawarah mufakat mengenai apa yang menjadi keluhan dan usulan dari masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Mbay 1.

Usulan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut merupakan program prioritas dalam pembangunan di Kelurahan Mbay 1. Dalam mewujudkan perencanaan yang sudah disepakati oleh masyarakat akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan serta memenuhi aspirasi masyarakat. Program pembangunan tersebut bukan saja dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta pengurus kelurahan yang melaksanakannya, tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Mbay 1 untuk mewujudkan berhasilnya

pembangunan di Kelurahan Mbay 1. Oleh sebab itu, diperlukan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya terutama dalam pengambilan keputusan, sebab partisipasi masyarakat adalah hal penting demi berhasilnya suatu pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Mbay 1 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal ini menentukan prioritas program pembangunan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan diketahui bahwa tiap lingkungan memiliki prioritasnya masing-masing berdasarkan kebutuhan masyarakat di lingkungan yang bersangkutan.

Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan yang membantu tugas lurah salah satunya yaitu sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan mengalami kendala. Selain itu juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak proaktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Mbay 1, sebab lembaga tersebut tidak mengkritisi mengenai apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang seharusnya menjalankan tugas sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dengan melakukan pengawasan atau pemantauan. Namun, setiap ada bantuan dari pemerintah untuk program pembangunan fisik, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak proaktif pada saat ada pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1.

Adapun hal yang menjadi hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1 yaitu pada saat ada program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan selalu diserahkan ke pihak ketiga yaitu tim pengawas dalam hal ini yang melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Seharusnya hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak proaktif terhadap pelaksanaan pembangunan fisik yang telah disetujui dan akan dilaksanakan di kelurahan Mbay 1. Selain itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di kelurahan Mbay 1 tidak mengkritisi mengenai apa yang sebenarnya menjadi tugas, tanggung jawab serta kewenangannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal. Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat dilihat kurang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mana pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak menentukan jadwal rapat yang tepat untuk melaksanakan rapat bersama setiap ketua RT dan kepala lingkungan dalam hal ini yaitu melakukan penggalian gagasan (pagas) untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu, keluhan serta usulan dari masyarakat untuk disampaikan ke pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta pengurus kelurahan Mbay 1 selanjutnya ketika ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dapat dikatakan sangat lama karena menunggu hal tersebut yang hanya diadakan satu kali dalam satu tahun.
2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kelurahan Mbay 1 yaitu pada saat ada program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan akan diserahkan ke pihak ketiga yaitu tim pengawas dalam hal ini yang melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut menyebabkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK) tidak proaktif terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1. Seharusnya, sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan fisik hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Namun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di kelurahan Mbay 1 tidak mengkritisi mengenai apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

Daftar Rujukan

- Abdulhak, Ishak & Suprayogi Ugi. 2012. *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bolong, Bertholomeus. 2003. *Problema Pembangunan Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Yayasan Pancaran Kasih.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial (cetakan ke-1)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Harun, Rochajat & Ardianto Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial, Perspektif Dominan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil & Kansil T.S. Christine. 2008. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah (cetakan ke-3)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Sugiyono. 2015. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (cetakan ke-21)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen (cetakan ke-6)*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyani. 2013. *Sosiologi Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.